PERSAINGAN PERBANKAN

Konsolidasi Berlanjut

JAKARTA — Jumlah bank di Indonesia bakal semakin menyusut seiring dengan gencarnya aksi akuisisi dan rencana merger di antara para pelaku industri ini.

Abdul Rahman
abdul.rahman@bisnis.com

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. berencana merealisasikan rencana mengakuisisi bank pada tahun ini. Direktur Utama BNI Achmad Baiquni mengatakan, pihaknya sedang menyeleksi bank yang akan diakuisisi.

"Kandidatnya tidak banyak. Kami tidak spesifik ke BUKU [Bank Umum Kelompok Usaha] I atau II. Yang paling penting bisa melengkapi fokus bisnis kami," katanya, Selasa (20/3).

Bank pelat merah lain yang berencana membeli bank adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. melalui anak usahanya PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. (BRI Agro). Bank yang diincar merupakan bank berskala kecil.

Direktur Utama BRI Agro Agus Noorsanto mengatakan, induk usaha mereka menginginkan agar pihaknya langsung mengakuisisi dua anak usaha sekaligus.

Dalam rencana bisnis tahun ini, BRI memang berencana kembali menyuntik modal BRI Agro lewat mekanisme *rights issue* sebesar Rp1,9 triliun – Rp2 triliun pada medio 2018.

Penambahan permodalan itu untuk mempercepat peningkatan skala BRI Agro dari BUKU II menjadi BUKU III dengan permodalan inti berkisar Rp5 triliun – Rp30 triliun. Saat ini permodalan BRI Agro masih berkisar Rp3,1 triliun.

PT Bank Central Asia Tbk. juga telah memastikan akan mengakuisisi dua bank kecil. Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menjelaskan bahwa kedua bank kecil tersebut akan digabung dan membentuk bank baru.

Di samping bank dalam negeri, sejumlah perusahaan keuangan asing juga ingin mengakuisisi bank di Indonesia, baik melalui anak usaha ataupun investasi langsung.

Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU) berencana mengakusisi saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank Danamon telah menyetujui rencana tersebut.

BTMU yang merupakan anggota dari Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), korporasi asal Jepang, berencana mengakuisisi 78,3% saham Danamon secara bertahap. Tahap pertama akuisisi telah dilaksanakan pada 29 Desember 2017 dengan 1,9 miliar lembar saham Danamon yang diambil alih. Kini BTMU memiliki 19,9% komposisi saham.

Merger antara PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. (BTPN) dan PT Sumitomo Mitsui Banking Corporation Indonesia (SMBCI) juga semakin dekat.

Pemegang saham pengendali perseroan yaitu Sumitomo Mitsui Banking Corporation ingin menggabungkan BTPN dengan anak usahanya yang lain yaitu PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI). Sumitomo Mitsui menguasai 97,63% saham SMBCI. Sedangkan di BTPN, mereka memegang 40% porsi saham.

Selain Jepang, bank asal Korea Selatan yaitu Industrial Bank of Korea (IBK) juga menyatakan minatnya mengakuisisi PT Bank Agris Tbk. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Agris telah menyetujui rencana akuisisi saham sebesar 87,3% oleh IBK.

Akuisisi saham yang akan diakuisisi oleh IBK merupakan saham yang dimiliki oleh PT Dian Intan Perkasa, Snow Lion Investment Ltd, Benjamin Jiaravanon, Enomu Capital Ltd dan Abbey Colonial Ltd.

BANK KECIL

Tak hanya investor yang mencari bank yang ingin diakuisisi, tetapi bank kecil pun ada yang menyatakan keinginan untuk diakuisisi. Belum lama ini PT Bank Capital Indonesia Tbk. menyatakan tengah mencari investor strategis yang berminat membeli sahamnya.

Direktur Utama Bank Capital Wahyu Dwi Aji mengatakan, sejauh ini telah ada beberapa pihak yang mendekat, tetapi belum ada yang benar-benar serius.

Proses merger PT Bank Dinar Tbk. dan PT Bank Oke Indonesia terus berjalan. Direktur Utama Bank Dinar Hendra Lie mengatakan, proses merger ditargetkan dapat rampung pada semester II/2018.

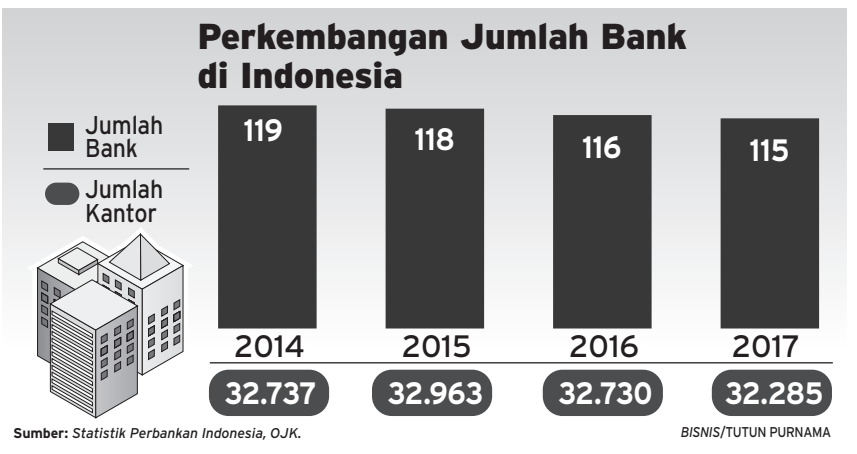

Sumber: *Statistik Perbankan Indonesia, OJK.*

BISNIS/TUTUN PURNAMA

PEMBIAYAAN BERSUBSIDI

BRI Syariah Pacu KUR

JAKARTA — PT Bank BRI Syariah menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah lebih tinggi pada 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. itu mengajak masyarakat hijrah ke KUR Syariah.

Demikian diungkapkan Widodo Januarso, Direktur BRI Syariah, saat mendampingi Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dalam acara Pelatihan Manajemen Koperasi Ritel di Serang, Banten, beberapa waktu lalu.

Dalam acara itu, diserahkan fasilitas KUR syariah bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Serang.

"Setelah berhasil menyalurkan KUR syariah sebesar Rp465 miliar pada 2017, pada tahun ini BRI Syariah menargetkan untuk menyalurkan pembiayaan KUR syariah sebesar Rp550 miliar," katanya lewat keterangan tertulis, Rabu (21/3).

Namun, menurutnya, kendati memacu pertumbuhan, BRI Syariah tetap mempertahankan aspek kehatian-kehatian dalam penyaluran KUR syariah.

Meskipun KUR syariah dijamin oleh asuransi, sambungnya, perseroan tetap menerapkan standar yang tinggi dan hanya akan memproses permohonan pembiayaan yang benar-benar memiliki kelayakan usaha walaupun belum bankable.

Kualitas pembiayaan KUR syariah sangat terjaga yang tampak dari rasio *non performing financing* (NPF) per Desember 2017 di bawah 0,1%.

Widodo menambahkan, grafik penyaluran KUR di BRI Syariah terus meningkat. Sepanjang Januari 2018 penyaluran KUR syariah masih sebesar Rp20,45 miliar dan meningkat menjadi Rp88,20 miliar.

Dia menyampaikan, alokasi BRI Syariah sudah didistribusikan ke seluruh unit kerja di seluruh wilayah Indonesia. BRI Syariah memaksimalkan 272 unit kerja jaringan yang tergabung dalam 52 kantor cabang untuk memasarkan KUR syariah.

"Sejalan dengan misi pemerintah yang ingin memacu sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa, pada 2018 BRI Syariah akan terus meningkatkan proporsi KUR syariah untuk sektor produksi yang meliputi sektor pertanian, termasuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Selain itu juga ada sektor perikanan, termasuk penangkapan dan pembudidayaan ikan."

Untuk sektor nonproduksi yaitu sektor perdagangan, BRI Syariah tetap mengalokasikan pembiayaan KUR syariah. Sektor ini meliputi seluruh usaha di sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk perdagangan dalam negeri, ekspor maupun impor.

Sebagaimana dijelaskan Widodo, saat ini BRI Syariah tengah melakukan kampanye tagar Faedah Hijrah (#Faedah Hijrah). "Kami mengajak masyarakat untuk berhijrah memanfaatkan pembiayaan syariah untuk hidup yang lebih barokah." ***(Ropesta Sitorus)***

PT. Phapros, Tbk

Kantor Pusat : Gedung RNI. Jl. Denpasar Raya Kav. D III
Kuningan, Jakarta 12950 Telp (021) 5276263
Pabrik : Jl. Simongan 131 Semarang 50148 Telp. (024) 7607330

Komite Akreditasi Nasional Laboratorium Kalibrasi LK-184-IDN

Phapros RNI GROUP

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET	2017	2016	LIABILITAS DAN EKUITAS	2017	2016
ASET LANCAR			**LIABILITAS JANGKA PENDEK**		
Kas dan setara kas	147.045	70.889	Utang usaha		
Piutang usaha			- Pihak ketiga	90.077	34.645
- Pihak ketiga	11.292	19.966	- Pihak berelasi	13.392	8.089
- Pihak berelasi	350.013	238.400	Beban akrual	39.593	28.697
Piutang lain-lain	117	77	Utang pajak		
Persediaan	158.650	188.988	- Pajak penghasilan	12.956	9.323
Uang Muka	46.239	3.340	- Pajak lain-lain	1.722	1.669
Biaya dibayar di muka	3.340	2.426	Utang dividen	2.917	2.938
Pajak dibayar di muka			Utang bank jangka pendek	20.000	98.000
- Pajak lain-lain	48.807	36.496	Utang bank jangka panjang - bagian lancar	3.563	2.843
			Utang lain-lain	504	206
Jumlah aset lancar	**765.505**	**560.583**	**Jumlah liabilitas jangka pendek**	**184.725**	**186.411**
ASET TIDAK LANCAR			**LIABILITAS JANGKA PANJANG**		
Investasi surat berharga	19.633	19.633	Medium term notes	200.000	-
Aset pajak tangguhan	17.798	14.437	Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar	9.315	7.789
Aset tetap			Kewajiban imbalan pasca kerja	80.506	67.009
Setelah dikurangi akumulasi depresiasi 2017 sebesar Rp 115.152 (2016 : Rp 98.530)	367.076	284.558	**Jumlah liabilitas jangka panjang**	**289.821**	**74.798**
Aset tak berwujud			**JUMLAH LIABILITAS**	**474.545**	**261.208**
Setelah dikurangi akumulasi amortisasi 2017 sebesar Rp 13.151 (2016 : Rp 12.382)	3.742	2.282	**EKUITAS**		
Aset tidak lancar lainnya	2.182	1.796	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan		
Jumlah aset tidak lancar	**410.431**	**322.706**	Modal saham-nilai nominal Rp500 (dalam Rupiah penuh) per saham	84.000	84.000
			Tambahan modal disetor	17.139	17.139
			Komponen Ekuitas Lain	108.446	111.305
			Saldo laba :		
			Dicadangkan	366.539	322.633
			Belum dicadangkan	125.266	87.002
			Jumlah ekuitas	**701.390**	**622.080**
JUMLAH ASET	**1.175.936**	**883.289**	**JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS**	**1.175.936**	**883.289**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2017	2016
Penjualan bersih	1.002.126	816.133
Beban pokok penjualan	(436.890)	(360.303)
Laba bruto	**565.236**	**455.830**
Beban Penjualan	(270.806)	(232.300)
Beban umum dan administrasi	(107.029)	(94.719)
Penghasilan keuangan	1.209	247
Beban keuangan	(16.968)	(21.416)
Penghasilan lain-lain	2.110	18.912
Beban Lain-lain	(2.403)	(4.819)
Laba sebelum pajak penghasilan	**171.348**	**121.736**
Manfaat/(beban) pajak penghasilan		
Pajak kini	(48.490)	(37.883)
Pajak tangguhan	2.408	3.150
Jumlah beban pajak penghasilan	**(46.082)**	**(34.733)**
Laba tahun berjalan	**125.266**	**87.002**
Penghasilan komprehensif lain		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Keuntungan revaluasi aset tetap	-	115.249
(Kerugian)/Keuntungan aktuaria dari manfaat program pensiun pasti	(3.812)	266
Pajak penghasilan yang terkait dengan pos yang tidak direklasifikasi	953	(67)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi :		
Aset keuangan tersedia untuk dijual	-	727
(Beban)/Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	(2.859)	116.176
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	**122.407**	**203.178**
Laba yang dapat diatribusikan kepada :		
Pemilik Perusahaan	125.266	87.002
Kepentingan non-pengendali	-	-
Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :		
Pemilik Perusahaan	122.407	203.178
Kepentingan non-pengendali	-	-
Laba per saham (Rupiah penuh)	**746**	**518**

LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI :		
Penerimaan kas dari pelanggan	909.909	846.175
Pembayaran kas kepada pemasok	(618.625)	(574.017)
Pembayaran kas kepada karyawan	(145.667)	(124.519)
Kas diperoleh dari aktivitas operasional	**145.617**	**147.639**
Penerimaan kegiatan operasi lainnya	747	207
Penerimaan bunga	1.209	247
Pembayaran PKBL	(825)	(1.059)
Pembayaran pajak	(44.722)	(32.951)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	**102.026**	**114.083**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI :		
Penerimaan dari penjualan aset tetap	-	1.522
Perolehan aset tetap dan aset tak berwujud	(89.167)	(42.888)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	**(89.167)**	**(41.366)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN :		
Penerimaan utang bank	117.289	270.689
Pembayaran utang bank	(193.043)	(276.057)
Penerimaan medium term notes	200.000	-
Pembayaran dividen kas		
Tahun berjalan	(42.340)	(28.756)
Tahun sebelumnya	(913)	(2.282)
Pembayaran bunga utang bank dan bunga medium term notes	(17.865)	(21.416)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	**(63.128)**	**(57.822)**
Pengaruh perubahan kurs mata uang pada kas dan setara kas	169	471
Kenaikan bersih kas dan setara kas	**76.156**	**15.366**
Kas dan setara kas pada awal tahun	**70.889**	**55.523**
Kas dan setara kas pada akhir tahun	**147.045**	**70.889**

Catatan : Informasi keuangan diatas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 diambil dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang telah memberikan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dalam laporannya tertanggal 12 Februari 2018, sedangkan untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Informasi tertentu seperti laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tahun 2017 dan 2016 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan diatas.

Semarang, Maret 2018
S.E.& O
Direksi

adhi
beyond construction

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.

Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat,13 April 2018
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Auditorium PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18
Jakarta 12510 - Indonesia

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 serta Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2017.
   Penjelasan:
   Sesuai ketentuan: (i) Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan (ii) Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), (iii) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN ("UU BUMN") dan (iv) Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("PERMEN PKBL") bahwa Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("RUPS") serta Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan menjadi satu kesatuan dengan Pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina yang bersangkutan.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017.
   Penjelasan:
   Sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 71 UUPT, Penggunaan Laba Bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.
3. Penetapan besaran Direksi dan honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018, tantiem bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 serta pemberian fasilitas dan tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.
   Penjelasan:
   Sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dan (iii) Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/06/2017 tanggal 19 Juni 2017, ketentuan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
   Penjelasan:
   Sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 36A ayat (1) POJK No.32/POJK.04/2014 sebagaimana yang diubah dengan POJK No.10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (iii) Pasal 71 UU BUMN dan (iv) Pasal 18 ayat (1) PERMEN PKBL dan (v) Pasal 13 ayat (1) POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam RUPS Tahunan ditetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan tahun berjalan Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
5. Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No.PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama beserta perubahannya.
   Penjelasan:
   Sesuai pasal 2 ayat (2) PERMEN PKBL bahwa Perseroan Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Peraturan tersebut yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
6. Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Buku 2017
   Penjelasan:
   Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/09/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara kepada BUMN dan Perseroan Terbatas. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan tambahan dana PMN pada RUPS dilaksanakan secara berkala setiap tahun bersamaan dengan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan.
7. Laporan Realisasi Penggunaan dana Penawaran Umum Terbatas I dan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I.
   Penjelasan:
   Sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK/04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
8. Persetujuan Spin Off Departemen TOD dan Hotel.
   Penjelasan:
   Perseroan akan melakukan pemisahan *(Spin Off)* aktiva dan pasivanya yang berada di Departemen Transit Oriented Development (TOD) & Hotel, dan dialihkan kepada Anak Perusahaan Perseroan yaitu PT Adhi Commuter Properti sesuai ketentuan Pasal 135 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pemisahan dilakukan agar kegiatan usaha yang terkait dengan Transit Oriented Development (TOD) dan Hotel dapat ditangani secara khusus dan lebih fokus oleh Anak Perusahaan.
9. Penambahan Modal Dasar Perseroan
   Penjelasan:
   Sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) pasal 41 UUPT, penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.
10. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
    Penjelasan:
    Sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) pasal 19 (1) UUPT, Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS. Anggaran Dasar Perseroan, meliputi:
    a. Penambahan Modal Dasar;
    b. Penambahan Sub Bidang Usaha Konstruksi Pengelolaan Limbah Pertambangan;
    c. Perubahan lainnya karena adanya program standardisasi anggaran dasar BUMN Terbuka terkait tata kelola sesuai ketentuan di bidang pasar modal oleh Kementerian BUMN selaku wakil pemegang saham Seri A Dwi Warna.
11. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
    Penjelasan:
    Sesuai dengan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dan atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang sub-rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 21 Maret 2018.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolekfif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar terakhir serta susunan pengurus terakhir.
5. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
6. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan:

   PT DATINDO ENTRYCOM
   Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120
   Telepon (021) 3508077

7. Bahan terkait mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dan dapat diambil pada jam kerja Kantor Perseroan dengan alamat PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 Jakarta 12510 Telp. 62-21 7975312, Fax. 62-21 7975311.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 22 Maret 2018
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
DIREKSI